

Analisis Kerawanan Pemilu Indonesia Tahun 2024 di Malaysia dan Dampaknya bagi Hak Demokrasi Pekerja Migran

Tia Nur Aisyah*, Ramanda Sheva Aurellia, Rika Dewi Sartika, Nuala Aisharani Kinasih Londo, Syahwa Fitria Kurniawan, Restu Rahmawati

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia, menghadapi berbagai kerawanan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak demokrasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kerawanan pemilu serta dampaknya terhadap hak demokrasi PMI. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber relevan untuk menggambarkan kondisi sosial dan struktural yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu 2024 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi, ketimpangan akses informasi, serta kendala administratif dan logistik menjadi hambatan utama dalam menjamin hak pilih PMI. Selain itu metode dan waktu pemungutan suara yang tidak adaptif terhadap kondisi kerja PMI memperparah keterbatasan partisipasi. Kerentanan ini diperkuat oleh lemahnya perlindungan struktural dan koordinasi antar penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerawanan pemilu berdampak langsung pada penurunan kolaboratif antar pemangku kepentingan guna memastikan partisipasi politik yang setara dan perlindungan hak demokrasi bagi seluruh warga negara luar negeri.

Kata Kunci: Pemilu, Kerawanan, Pekerja Imigran, Demokrasi.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v2i4.406>

*Correspondence: Tia Nur Aisyah

Email:

2310413100@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 12-02-2025

Accepted: 20-03-2025

Published: 27-04-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The implementation of Indonesian elections abroad, especially in Malaysia, faces various vulnerabilities that have the potential to hinder the fulfillment of democratic rights for Indonesian Migrant Workers (PMI). The purpose of this study is to identify and analyze the forms of electoral vulnerability and their impact on the democratic rights of PMI. Using a descriptive qualitative approach and literature study method, this research examines various relevant sources to describe the social and structural conditions that affect the implementation of the 2024 General Election in Malaysia. The results show that the lack of socialization, inequality in access to information, as well as administrative and logistical constraints are the main obstacles in ensuring the voting rights of PMI. In addition, voting methods and times that are not adaptive to migrant workers' working conditions exacerbate participation limitations. This vulnerability is reinforced by weak structural protection and coordination between election organizers. This research concludes that electoral insecurity has a direct impact on reducing collaboration between stakeholders to ensure equal political participation and the protection of democratic rights for all overseas citizens.

Keywords: Elections, Vulnerability, Immigrant Workers, Democracy.

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat (Sukriono, 2009). Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pondasi utama dalam tatanan demokrasi modern, sebuah mekanisme penting yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan representasi politik dan arah kebijakan negara. Setiap warga memiliki hak suara dan peluang yang sama untuk membela hak-haknya dan memengaruhi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Iswardhana, 2023a). Teori Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak politik. HAM merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap manusia serta melimpahkan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi (Agriawan & Widiarto, 2023). Hak untuk memilih dan dipilih, yang dijamin oleh konstitusi nasional dan berbagai instrumen hukum internasional, adalah hak asasi fundamental bagi setiap orang, tanpa kecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Dengan menggunakan hak suara mereka, warga dapat memperjuangkan masalah penting bagi komunitas mereka dan mendukung keadilan sosial secara keseluruhan (Nur Hayati, 2022). Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, meskipun merupakan perwujudan dari prinsip inklusivitas demokrasi, menghadirkan serangkaian tantangan dan kompleksitas yang unik, terutama dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi kerawanan yang dapat mengancam integritas proses elektoral dan secara langsung berdampak pada pemenuhan hak demokrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini menganalisis kerawanan yang mungkin terjadi selama Pemilu Indonesia tahun 2024 di Malaysia, sebuah negara dengan populasi PMI yang signifikan dan dampak kerawanan tersebut terhadap pelaksanaan hak-hak demokrasi mereka di negara tersebut.

Menurut Bank Indonesia, Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki populasi PMI terbesar di dunia dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap Indonesia melalui remitansi. Oleh karena itu, partisipasi politik mereka dalam Pemilu bukan sekadar pemenuhan hak individu, tetapi juga faktor penting dalam memastikan bahwa suara dan kepentingan kolektif mereka terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Sosial-budaya, ekonomi, dan regulasi yang spesifik di Malaysia juga menciptakan lanskap yang kompleks bagi penyelenggara Pemilu. Regulasi ekonomi, sosial, dan budaya yang unik di Malaysia menyebabkan lanskap penyelenggaraan pemilu menjadi rumit. Perbedaan dalam sistem hukum dan administrasi pemilu antara Malaysia dan Indonesia, tantangan logistik dalam menjangkau PMI yang tersebar di berbagai wilayah dan sektor pekerjaan, dan kemungkinan kerentanan sosial dan ekonomi yang dihadapi PMI dapat menyebabkan munculnya berbagai bentuk kerawanan pemilu. Pasal 25 ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang jujur dan berkala, dengan jaminan bahwa hak tersebut tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang sah.

Kerawanan-kerawanan ini, yang mencakup manipulasi data pemilih, praktik politik uang yang mungkin menargetkan kerentanan ekonomi PMI, penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih, kemungkinan intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu (baik formal maupun informal), dan ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi pemilu yang akurat, netral, dan tepat waktu, dapat secara signifikan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan dapat mengancam hak PMI untuk memilih secara bebas, rahasia, dan tanpa paksaan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara sistematis berbagai bentuk kerawanan yang mungkin terjadi di setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Indonesia tahun 2024 di Malaysia, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan rekapitulasi. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kerawanan-kerawanan tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak demokrasi PMI. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias tentang peserta dan proses pemilihan, hak untuk mencalonkan diri (bagi mereka yang memenuhi persyaratan), hak untuk memilih secara bebas dan rahasia tanpa tekanan, intimidasi, atau iming-iming, dan hak untuk mengakses mekanisme demokrasi PMI. Dalam penelitian ini, teori partisipasi politik digunakan untuk menganalisis tingkat keterlibatan pekerja migran dalam Pemilu 2024 di luar negeri. Dalam suatu pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu (Halim et, al., 2016). Kendala administratif, kurangnya informasi, serta hambatan sosial dan budaya dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi sosial pelaksanaan Pemilu Indonesia tahun 2024 di Malaysia khususnya yang mempengaruhi pemenuhan hak demokrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fokus utama penelitian ini mengidentifikasi dan juga menganalisis berbagai bentuk kerawanan pemilu yang terjadi di luar negeri serta bagaimana dampaknya terhadap hak demokrasi PMI. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif dengan mengacu pada teori-teori mengenai partisipasi politik lalu diuji relevansinya dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan seperti laporan resmi lembaga negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, ataupun berita dari media yang berkredibilitas. Data kualitatif yang diperoleh disusun dalam bentuk narasi, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, kategori, dan hubungan yang berkaitan dengan kerawanan pemilu luar negeri dan dampaknya terhadap hak politik PMI.

Hasil dan Pembahasan

Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Pemilu Bagi Pekerja Migran Indonesia

Dilansir dari bawaslu.go.id, Malaysia menjadi negara paling rawan terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak pilih dan kualitas daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 (Agusta, 2023). Minimnya sosialisasi dan edukasi politik menjadi tantangan utama dalam menjamin hak demokrasi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Banyak PMI tidak mendapatkan informasi cukup tentang hak pilih, mekanisme pemungutan suara, hingga jadwal pelaksanaan pemilu. Ketidaktahuan ini menyebabkan sejumlah suara tidak sah karena ketidaksesuaian prosedur seperti kesalahan pengisian formulir atau tidak dikirimkannya formulir yang wajib disertakan (Tempo, 2018). Hal ini menunjukkan lemahnya peran penyelenggara pemilu dalam menjangkau komunitas PMI, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan tinggal di lokasi terpencil. Menurut Wahyu Susilo dari Migrant CARE, partisipasi pemilih luar negeri selalu rendah, bahkan sering kali di bawah 50 persen, menandakan hambatan struktural yang menghalangi keterlibatan aktif PMI dalam proses demokrasi (Susilo, 2023). Hambatan ini diperparah oleh aturan ketat negara tujuan kerja seperti Malaysia yang membatasi kegiatan sosialisasi, seperti larangan melakukan kampanye *door to door* oleh pihak asing tanpa izin resmi (Prasetyo, 2024). Akibatnya, panitia pemilu kesulitan menjangkau pemilih secara langsung, dan banyak PMI akhirnya tidak tahu-menahu mengenai pelaksanaan pemilu.

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Pemilu 2024 di Malaysia

Kota di Malaysia	Jumlah DPTLN
Kuala Lumpur	447.258
Johor Baru	119.491
Kota Kinabalu	98.669
Kuching	64.900
Tawau	59.442
Penang	42.660
Total Malaysia	832.420

Sumber : Liputan6, 2024 (<https://www.liputan6.com/global/read/5527863/pemilu-2024-ini-10-kota-dengan-daftar-pemilih-terbanyak-di-luar-negeri>)

Pada Pemilu Indonesia tahun 2024 yang dilaksanakan di Malaysia, Malaysia merupakan negara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) tertinggi dalam Pemilu 2024, mencapai 832.420 orang yang tersebar di enam wilayah kerja PPLN, dengan dominasi terbesar berada di Kuala Lumpur sebanyak 447.258 pemilih (Liputan6, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa Malaysia adalah pusat konsentrasi pekerja migran Indonesia yang sangat signifikan dalam konteks pemilu luar negeri. Namun, tingginya jumlah pemilih ini tidak diikuti dengan tingkat partisipasi yang proporsional. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. Dari total 62.217 pemilih yang masuk dalam daftar PSU, hanya 3.605 orang yang hadir dan menggunakan hak suaranya, atau setara dengan tingkat partisipasi sekitar 5,8 persen saja (Kompas, 2024).

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, 10 Maret 2024

Keterangan	Jumlah
Jumlah DPT	62.217
Pemilih yang menggunakan hak suara	3.605
Tingkat Partisipasi	5,8 %

Sumber : Kompas, 2024 (<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/15030471/pemilu-ulang-di-kuala-lumpur-banyak-wni-tak-gunakan-hak-pilih-prabowo-gibran>)

Kesenjangan antara jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah yang benar-benar menggunakan hak pilih mencerminkan lemahnya efektivitas sosialisasi dan edukasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di luar negeri. Rendahnya partisipasi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa meskipun secara administratif DPTLN sudah tinggi, secara substantif partisipasi pemilih migran masih sangat lemah (Antara, 2024). Minimnya akses informasi, kurangnya pemahaman prosedur pemilu, hingga potensi kendala logistik seperti lokasi kerja yang jauh dari TPS, menjadi faktor yang memperparah kondisi ini (Bawaslu, 2023). Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah DPTLN yang tinggi belum bisa dijadikan indikator keberhasilan demokrasi jika tidak disertai dengan pemberdayaan politik yang memadai bagi pekerja migran.

Secara kultural, kesadaran politik di kalangan PMI masih tergolong rendah. Mayoritas PMI lebih berfokus pada pekerjaan dan cenderung menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu posisi mereka di tempat kerja, termasuk kegiatan yang bernuansa politik (Bonasir, 2019). Selain itu, banyak dari mereka yang belum pernah mendapatkan pendidikan politik secara memadai, baik di tanah air maupun selama bekerja di luar negeri (Antara News, 2024). Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dan keterlibatan mereka dalam pemilu, meskipun secara hukum mereka tetap memiliki hak suara. Meski ada beberapa upaya literasi, sebagian besar program masih terbatas pada aspek keuangan dan hukum ketenagakerjaan. Edukasi terkait demokrasi dan hak pilih belum menjadi prioritas utama dalam program pemberdayaan PMI (Suranto et al., 2024). Studi oleh Hasanah dan Rejeki (2021) menegaskan bahwa penyuluhan hukum mengenai hak politik PMI masih sangat terbatas, baik dari segi materi maupun jangkauan sasaran. Padahal, edukasi politik sangat krusial agar para PMI bisa secara sadar dan aktif mengambil bagian dalam pesta demokrasi.

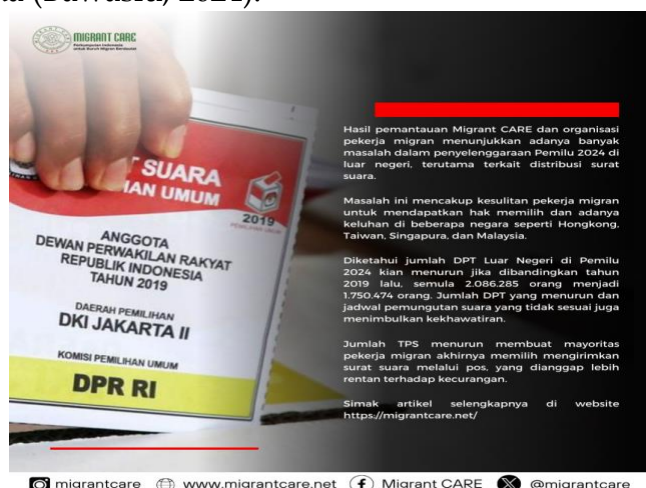
Minimnya sosialisasi dan edukasi pemilu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dapat dianalisis melalui teori partisipasi politik *Civic Voluntarism Model* dari Verba, Schlozman, dan Brady (1995), yang menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sumber daya, keterlibatan psikologis, dan mobilisasi. PMI sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi politik karena keterbatasan waktu, pendidikan, dan lokasi kerja yang terpencil, sehingga sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif sangat terbatas. Selain itu, kesadaran politik mereka rendah karena merasa tidak memiliki kaitan

langsung dengan proses politik di tanah air, dan kurangnya ajakan dari penyelenggara pemilu juga memperparah keadaan, terutama karena pembatasan aktivitas politik oleh otoritas Malaysia.

Kondisi ini menciptakan jurang demokrasi yang cukup dalam. Partisipasi PMI yang minim tidak hanya menjadi ancaman bagi representasi mereka dalam proses politik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam pelaksanaan demokrasi substansial. Dalam catatan pemantauan pemilu luar negeri, disebutkan bahwa banyak PMI merasa suara mereka tidak relevan karena tidak ada ruang untuk mengartikulasikan aspirasi sejak awal tahapan pemilu (Aresta, 2023). Upaya perbaikan harus melibatkan kerja kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), organisasi masyarakat sipil, serta komunitas PMI di negara tujuan. Penggunaan teknologi informasi seperti media sosial, WhatsApp, hingga *platform* edukasi daring dapat dijadikan sarana penyebaran informasi yang lebih efektif dan murah (Munarni & Simon, 2021). Selain itu, pelibatan tokoh komunitas dan organisasi diaspora PMI juga penting untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan edukasi politik (DPR RI, 2023).

Ketimpangan Akses dalam Metode dan Waktu Pemungutan Suara Bagi Pekerja Migran Indonesia

Penyelenggaraan Pemilu Indonesia di luar negeri, termasuk Malaysia, masih menyisakan berbagai kerentanan, khususnya dalam hal aksesibilitas bagi pekerja migran. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbesar, Malaysia menjadi cermin penting dalam melihat sejauh mana sistem pemilu mampu mengakomodasi hak politik kelompok ini. Metode pemungutan suara yang digunakan, seperti Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos, seringkali tidak sesuai dengan realitas lapangan yang dihadapi pekerja migran (Agusta, 2023). Misalnya, lokasi TPS yang jauh dari tempat kerja atau domisili pekerja, serta ketidakjelasan dalam jadwal dan distribusi surat suara via pos, menjadi hambatan serius bagi partisipasi mereka (Bawaslu, 2024).



Gambar 1. Hasil Pemantauan Migrant Care

Sumber: Migrant Care, 2024

Selain metode, waktu pelaksanaan pemungutan suara juga menjadi persoalan penting. Banyak pekerja migran bekerja dalam sistem jam kerja yang ketat dan panjang, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, dan domestik. Tanpa adanya dispensasi resmi dari pemberi kerja, mereka kesulitan untuk hadir mencoblos secara langsung. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari panitia pemilu luar negeri (PPLN) mengenai jadwal dan mekanisme pemungutan suara yang fleksibel atau alternatif, seperti pemungutan suara di akhir pekan atau hari libur, kertas suara yang tidak sesuai dengan para pemilih yang akan mengikuti pemilu, fasilitas yang masih kurang memadai juga (Migran Care, 2024). Akibatnya, banyak pekerja migran yang secara teknis memiliki hak pilih, namun tidak dapat menggunakannya karena keterbatasan waktu dan akses.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem pemilu belum sepenuhnya inklusif terhadap kondisi pekerja migran yang merupakan warga negara dengan hak politik yang setara (Basyari, 2024). Hak demokrasi mereka terhambat oleh hambatan struktural yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis seperti minimnya perlindungan kebijakan untuk memastikan mereka dapat memilih tanpa kesulitan baik dari fasilitas, keamanan, dan regulasi yang jelas dan tersusun (BBC, 2024). Ketika metode dan waktu pemungutan suara tidak adaptif terhadap kebutuhan kelompok ini, maka negara secara tidak langsung menutup ruang partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Tempo, 2024).

Lebih jauh, ketimpangan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam representasi politik antara warga negara yang tinggal di dalam negeri dan mereka yang bekerja di luar negeri (Migran Care, 2024). Padahal, kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional sangat signifikan melalui remitansi yang mereka kirimkan setiap tahun. Namun, dalam aspek politik, suara mereka belum mendapatkan tempat yang proporsional. Jika akses terhadap pemilu terus dibiarkan timpang, maka negara tidak hanya mengabaikan hak konstitusional warganya, tetapi juga gagal merangkul suara diaspora yang seharusnya menjadi bagian dari arah masa depan demokrasi Indonesia.

Dampak Kerentanan serta Kerawanan Pemilu di luar negeri terhadap hak demokrasi Pekerja Migran Indonesia

Penyelenggaraan pemilu luar negeri merupakan tantangan tersendiri dalam menjamin hak-hak politik seluruh warga negara Indonesia, terutama kelompok rentan seperti pekerja migran Indonesia (PMI). Malaysia, sebagai negara tujuan utama PMI, menjadi titik penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem demokrasi transnasional Indonesia (Migrant CARE, 2019). Meski secara konstitusional seluruh WNI berhak memilih, realitas menunjukkan bahwa banyak PMI menghadapi kendala struktural dan teknis dalam menyalurkan hak politiknya (Bawaslu, 2019).

Kerentanan PMI terhadap proses demokrasi berasal dari status kerja yang tidak tetap, keterbatasan dokumen resmi, hingga akses informasi yang minim. PMI, khususnya yang bekerja di sektor domestik, seringkali tidak memiliki waktu maupun kebebasan untuk mengakses tempat pemungutan suara (TPS) atau memahami mekanisme pemilu (Migrant CARE, 2019). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sosialisasi dan edukasi politik yang

dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat (Migrant CARE, 2019).

Di sisi lain, kerawanan pemilu mencakup aspek teknis dan prosedural, seperti keterlambatan distribusi logistik, ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), hingga dugaan manipulasi suara (Bawaslu, 2024). Dalam pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu menemukan berbagai bentuk pelanggaran administrasi, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi penyelenggara serta hambatan teknis yang menyebabkan sebagian PMI kehilangan hak suaranya (Bawaslu, 2024). Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak demokrasi WNI di luar negeri dan mencerminkan buruknya tata kelola pemilu lintas negara (KPU & Bawaslu, 2024).

Secara normatif, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi yang setara dan inklusif bagi seluruh warga negara. Dalam pandangan Dahl (1989), prinsip "*effective participation*" menjadi salah satu fondasi demokrasi, yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pilihan politiknya (Dahl, 1989). Namun, dalam praktiknya, PMI kerap dikecualikan secara tidak langsung dari proses tersebut karena kendala struktural dan administratif yang tidak ditangani secara serius oleh negara (Migrant CARE, 2019).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesetaraan hak dalam demokrasi Indonesia. Ketika ribuan PMI tidak dapat memilih, maka negara telah gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap seluruh warga negara, termasuk yang berada di luar negeri (Bawaslu, 2024). Masalah ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil pemilu, tetapi juga memperlemah kepercayaan masyarakat diaspora terhadap negara (International IDEA, 2021).

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilu Indonesia tahun 2024 di Malaysia menghadapi berbagai bentuk kerawanan yang secara signifikan berdampak terhadap perwujudan hak demokrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi tantangan bagi partisipasi demokratis PMI. Pertama, minimnya sosialisasi dan edukasi pemilu yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman politik di kalangan PMI, tercermin dari tingkat partisipasi yang sangat rendah (5,8%) pada Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur. Kedua, ketimpangan akses dalam metode dan waktu pemungutan suara yang tidak adaptif terhadap realitas kerja PMI, seperti lokasi TPS yang jauh dan mekanisme pemilihan yang tidak fleksibel. Ketiga, kerentanan struktural status PMI yang diperparah oleh kendala teknis dan administratif dalam proses elektoral.

Dampak dari kerawanan ini tidak hanya menghasilkan angka partisipasi yang rendah, tapi juga menciptakan kesenjangan representasi politik antara warga negara di dalam dan luar negeri. Meskipun Malaysia memiliki DPTLM tertinggi mencapai 832.420 orang, namun tingkat partisipasi aktual sangat jauh dari potensi tersebut. Keadaan ini mencerminkan ketimpangan substansial dalam sistem demokrasi transnasional Indonesia, dimana kontribusi ekonomi PMI melalui remitansi tidak diimbangi dengan perlindungan

memadai terhadap hak-hak politik mereka. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri, termasuk penguatan sosialisasi berbasis teknologi, fleksibilitas metode pemungutan suara, dan kerjasama lintas sektoral antara KPU, Kementerian Luar Negeri, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan terpenuhinya hak demokrasi.

Referensi

- Agriawan, M., & Widiarto, R. S. (2023). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2437-2448.
- Antara News. (2024). *Upaya meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2024 di luar negeri*. <https://makassar.antaranews.com/berita/520905/upaya-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-di-luar-negeri>
- Antara News. (2024). DPR RI: Sosialisasi pekerja migran legal perlu dimasifkan, cegah TPPO. <https://www.antaranews.com/berita/3986682>
- Aqdamana, T. (2022). Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2801>
- Aresta, T. D. Y. (2023). Catatan Awal Pemantauan Pemilu Luar Negeri: Kerentanan dan Minimnya Aspirasi Pekerja Migran dalam Pemilu. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org>
- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pengawasan pemilu luar negeri tahun 2024*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pengawasan-pemilu-2024-di-luar-negeri>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2023). *Bawaslu luncurkan IKP Luar Negeri: Malaysia paling rawan*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-luncurkan-ikp-luar-negeri-malaysia-paling-rawan>
- Bonasir, R. (2019). Pemilu: TKI di luar negeri merasa 'dimanfaatkan' dan kemudian 'dilupakan'. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47614007>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.

- detikNews, T. (2025). *MK Hapus Presidential Threshold 20%, Ini Pertimbangannya*. detiksel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7714965/mk-hapus-presidential-threshold-20-ini-pertimbangannya>
- DPR RI. (2023). Komisi IX Dorong Akses Sosialisasi dan Perlindungan PMI Diperluas. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45612>
- Fadhlurrahman, R. (2024). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG DALAM KAMPANYE BERDAMPAK PADA TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i2.44097>
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Penyuluhan hukum tentang hak pilih pekerja migran Indonesia dalam pemilu. *Journal of Community Empowerment*, 2(1), 24. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce/article/view/19950>
- Hayati, N. N. (2021). Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 23–34.
- Herjunanto, D. H., & Sulaksono, S. (2023). ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 119–126. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.52229>
- International IDEA. (2021). *Global State of Democracy Report*.
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081–1088.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Perlindungan Hak PMI Di Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/perlindungan-hak-pmi-di-malaysia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia>
- Kompas. (2024). *Pemilu ulang di Kuala Lumpur: Banyak WNI tak gunakan hak pilih*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/15030471/pemilu-ulang-di-kuala-lumpur-banyak-wni-tak-gunakan-hak-pilih-prabowo-gibran>

- Kompas. (2024). *Pelaksanaan pemilu luar negeri bermasalah, minat pemilih bisa menurun*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/18/pelaksanaan-pemilu-luar-negeri-bermasalah-minat-pemilih-bisa-menurun>
- KPU & Bawaslu. (2024). *Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri 2024*.
- Liputan6. (2024). *Pemilu 2024: Ini 10 kota dengan daftar pemilih terbanyak di luar negeri*. <https://www.liputan6.com/global/read/5527863/pemilu-2024-ini-10-kota-dengan-daftar-pemilih-terbanyak-di-luar-negeri>
- Migran Care. (2024). Catatan Awal Migrant CARE: Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia. *MIGRANTCARE.NET*. <https://migrantcare.net/2024/01/catatan-awal-migrant-care-kerawanan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-ancaman-hak-terhadap-demokrasi-pekerja-migran-indonesia/>
- Migrant CARE. (2019). Catatan Akhir Tahun 2019: *Demokrasi dan Migrasi*.
- Munarni, A., & Simon, A. J. (2021). Kerentanan dan ketahanan pekerja migran Indonesia di Malaysia pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.372>
- Perludem. (2022). *Rekomendasi Reformasi Pemilu Luar Negeri: Studi Kasus Malaysia dan Hong Kong*.
- Prasetyo, A. D. (2024). Migrant CARE Soroti Sosialisasi PSU di Kuala Lumpur. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/pemilihan/014425862>
- Simamora, P. H. (2022). Political literacy and the rights of migrant workers in the electoral process. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 33–45
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.
- Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (2022). Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3319>.
- Suranto, S., Sari, D. E., Syah, M. F. J., Imran, M. A., Sihotang, I. M., & Fatmahwati, S. (2024). Peningkatan literasi dan akses informasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia

-
- di Malaysia. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4), 486–494.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.69669>
- Susilo, W. (2023). Pemilu 2024 dan Peminggiran Pekerja Migran Indonesia. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilu-2024-dan-peminggiran-pekerja-migran-indonesia>
- Tempo. (2018). Migrant Care: Banyak Potensi Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri.
<https://pemilu.tempo.co/read/1133982/migrant-care-banyak-potensi-pelanggaran-pemilu-di-luar-negeri>
- Wuryandari, G. (2016). *Diplomasi bilateral Indonesia dalam isu pekerja migran*. Graha Ilmu.